



Islamic Society dan Problematika Muslim Minoritas di Papua Nugini pada 1978-2001

Vanesha Akhwa

vaneshaakhwa3012@gmail.com

Sejarah Peradaban Islam

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Didin Nurul Rosidin

didinnurulrosidin@uinssc.ac.id

Sejarah Peradaban Islam

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Hasbiyallah

hasbiyallah@uinssc.ac.id

Sejarah Peradaban Islam

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

• **Received:** 16.06.2025 • **Accepted:** 03.12.2025 • **Published:** 03.12.2025

Abstract: *As a minority group, Muslims in Papua New Guinea have their own struggles, even just to survive in the midst of Christian domination. This study aims to explain the history of the entry of Islam and the establishment of the Islamic Society of Papua New Guinea (ISPNG) in 1978, describe the problems faced by Muslim minorities, and analyze ISPNG's efforts in solving these problems. The method used is a historical approach through the stages of topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography. Theories used include theories of minority groups, Islamization, social problems, and social movements. The results showed that Islam has been known since the 16th century, but experienced significant development after ISPNG played an active role in facing discrimination, limited worship facilities, and difficulties in obtaining halal food through various proselytization strategies, building mosques, providing halal food, and collaborating with international networks.*

Keywords: *ISPNG, Problems, Muslims, Papua New Guinea.*

Abstrak: Sebagai sebuah kelompok minoritas, umat Muslim di Papua Nugini memiliki tantangan tersendiri, bahkan untuk sekadar bertahan hidup di tengah dominasi Kristen. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah masuknya Islam dan berdirinya *Islamic Society of Papua New Guinea* (ISPNG) pada 1978, menggambarkan problematika yang dihadapi Muslim minoritas, serta menganalisis upaya ISPNG dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan historis melalui tahapan pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Teori yang digunakan meliputi teori kelompok minoritas, islamisasi, problematika sosial, dan gerakan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam telah dikenal sejak abad ke-16, namun mengalami

perkembangan signifikan setelah ISPNG hadir berperan aktif dalam menghadapi diskriminasi, keterbatasan fasilitas ibadah, dan kesulitan memperoleh makanan halal melalui berbagai strategi dakwah, pembangunan masjid, penyediaan makanan halal, serta menjalin kerja sama dengan jaringan internasional.

Kata Kunci: ISPNG, Problematika, Muslim, Papua Nugini.

1. Pendahuluan

Papua Nugini secara letak geografis berdekatan dengan Indonesia, yakni di sebelah timur pulau Papua. Akan tetapi secara keagamaan, khususnya Islam, umat Muslim di Papua Nugini tergolong sebagai kelompok minoritas. Berdasarkan *World Religions Database* yang diterbitkan oleh *Boston University* pada tahun 2020, populasi Muslim di Papua Nugini diperkirakan mencapai sekitar 10.000 jiwa dari total sembilan juta jiwa penduduk di Papua Nugini.¹ Islam sendiri diyakini sudah masuk ke Papua Nugini pada abad ke-16 melalui aktivitas pelayaran di pesisir barat Papua Nugini oleh Kesultanan Tidore. Akan tetapi, tidak tercatat aktivitas keagamaan yang signifikan melainkan hanya bukti keterikatan politik antara Kesultanan Tidore dan pemimpin lokal di Papua Nugini secara tidak langsung.²

Faktor penyebab terhambatnya aktivitas keagamaan Islam di Papua Nugini ialah karena faktor historis dan keagamaan tradisional. Mayoritas penduduk Papua Nugini menganut kepercayaan tradisional yang penuh dengan simbolisme dan mitologi kuno. Bentuk-bentuk kepercayaan tradisional di wilayah pesisir tetap terjaga hingga awal abad ke-20, sementara beberapa daerah pegunungan masih terisolasi hingga akhir tahun 1930-an. Selain itu, secara historis Papua Nugini pernah dikuasai oleh Inggris, Jerman dan Australia yang sebagian besar beragama Kristen. Respon masyarakat terhadap ekspedisi Kristen pertama pada 1920 ialah menganggap para penyebar agama sebagai roh leluhur yang kembali, membawa harapan untuk dukungan dalam konflik dan kemakmuran.³

Islam mulai masuk ke Papua Nugini dalam ranah formal saat Papua Nugini secara resmi menjadi anggota Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*) pada tahun 1976. Kontak awal ini difasilitasi oleh kedatangan para pekerja imigran kontrak dari Asia dan Afrika. Seiring berjalannya waktu, pekerja Muslim yang terampil dari negara-negara seperti India, Pakistan, Sudan, Bangladesh, dan lainnya mulai bermigrasi ke Papua Nugini. Orang-orang ini mendapatkan

¹ United States Department of State, *International Religious Freedom Report*, 2022, hlm.2 dikutip tanggal 13 Mei 2025 pada laman state.gov/reports/

² Holger Warnk, 'The Coming of Islam and Moluccan-Malay Culture to New Guinea 1500-1920', *Indonesia and the Malay World*, 38.110 (2010), hlm. 111 diakses tanggal 4 Februari 2025 pada laman researchgate.net/249003624/.

³ Dusan Luzny and Martin Soukup, 'Encounter of Religions in Papua New Guinea: Toward a Relationship between Christianity and Original Traditions', *Horizons: College Theology Society*, 2023, hlm. 2 dikutip tanggal 18 Januari 2025 pada laman cambridge.org/.

pekerjaan di berbagai sektor di Papua Nugini, termasuk lembaga pendidikan tinggi, departemen pekerjaan umum, dan bidang administratif lainnya.⁴

Para imigran Muslim di Papua Nugini khususnya di Port Moresby dan Lae saling terintegrasi dalam beberapa pertemuan dan kegiatan sosial bersama, juga sholat berjamaah bergantian di kediaman salah satu imigran. Hal tersebut menggerakkan hati Qazi Ashfaq, seorang dosen di Politeknik Lae, untuk membentuk sebuah organisasi bernama *Islamic Society of Papua New Guinea* (ISPNG) guna memperluas Islamisasi di Papua Nugini dan membentuk persaudaraan antar umat Muslim. Berdirilah organisasi Islam pertama di Papua Nugini pada tahun 1978 dengan pusat kegiatan di Port Moresby.⁵

Sebagai sebuah kelompok minoritas, umat Muslim di Papua Nugini memiliki tantangan tersendiri, bahkan untuk sekadar bertahan hidup di tengah dominasi Kristen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berdirinya *Islamic Society of Papua New Guinea*, dan menggambarkan problematika yang dihadapi Muslim minoritas baik secara internal maupun eksternal, serta menganalisis upaya ISPNG dalam menyelesaikan berbagai problematika Muslim minoritas di Papua Nugini.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan bidang keilmuan sejarah. Menurut Kuntowijoyo metode penelitian sejarah terbagi menjadi lima tahap, yakni pemilihan topik, pencarian sumber sejarah, kritik terhadap sumber, interpretasi dan historiografi.⁶ Pada penelitian ini, pemilihan topik didasari dengan kedekatan emosional sebagai bentuk apresiasi terhadap umat Muslim di Papua Nugini yang telah bertahan sebagai sebuah kelompok minoritas. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah studi literatur dengan sumber primer catatan perjalanan, website resmi *Islamic Society of Papua New Guinea*, dan berita harian. Data-data tersebut kemudian diverifikasi dengan menelaah dan membandingkan informasi yang diperoleh. Kemudian diinterpretasikan dalam sebuah tulisan ilmiah dengan gaya historiografi modern.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Berdirinya *Islamic Society of Papua New Guinea*

Setelah interaksi formal Islam dengan Papua Nugini pada 1976 melalui para imigran dari kawasan Asia dan Afrika, mereka mulai berkumpul secara rutin untuk

⁴ Graeme Hugo, 'Migration in the Asia-Pacific region', *Occasional Papers*, 2005, hlm.15, diakses tanggal 08 November 2024 pada laman <https://internationalorganizationformigration/com/>.

⁵ Scott Flower, 'The Struggle to Establish Islam in Papua New Guinea (1976-83)', *Journal of Pacific History*, 44.3 (2009), hlm. 246-247 diakses tanggal 10 November 2024 pada laman [jstor.org/stable/25701184](https://www.jstor.org/stable/25701184).

⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2018) hlm. 78 diunduh tanggal 13 November 2024 pada laman [academia.edu/57371911/](https://www.academia.edu/57371911/).

melaksanakan salat berjamaah. Pada tahap awal, mereka memilih untuk melaksanakan salat Magrib secara bersama-sama setiap hari Jumat. Beberapa bulan kemudian, mereka berinisiatif untuk mengadakan salat Jumat di rumah salah satu anggota komunitas Muslim yang berada di lingkungan Universitas Papua Nugini.

Melalui kegiatan bersama yang dilakukan rutin tersebut, pada 1978 berdirilah *Islamic Society of Papua New Guinea* (ISPNG) sebuah organisasi Islam pertama di Papua Nugini yang bertujuan melindungi umat Muslim dan memperkuat eksistensi Islam di Papua Nugini. Organisasi ISPNG diinisiasi oleh Qazi Ashfaq Ahmad, seorang profesor di bidang Teknik Mesin *University of Technology, Lae*, yang juga membawa nama Muslim di Papua Nugini sebagai anggota *Regional Islamic Da'wah Council of South East Asia and Pacific* (RISEAP).⁷

Langkah berikutnya yang diambil *Islamic Society of Papua New Guinea* adalah pembentukan struktur pengurus organisasi. Melalui musyawarah, terpilih beberapa nama, yakni Ahmad Badwi dari Sudan terpilih sebagai Presiden, Noorul Amin dari Bangladesh sebagai Wakil Presiden, Afzal Choudry sebagai Sekretaris, dan Shaukat Noor Khan dari India sebagai Bendahara. Berdasarkan teori kelompok minoritas, sebuah perkumpulan atau organisasi dikatakan sebagai kelompok minoritas jika secara jumlah pengikut paling sedikit dibanding dengan kelompok mayoritas.⁸ Beberapa anggota ISPNG yang tercatat pada tahun 1980 ialah hanya 120 orang, dengan seluruhnya terdiri dari para imigran.⁹

B. Problematika Muslim Minoritas di Papua Nugini

Berdasarkan teori problematika sosial, suatu kondisi dapat diidentifikasi sebagai suatu “masalah” jika menimbulkan respon sosial terhadap masyarakat.¹⁰ Pada penelitian ini berikut beberapa problematika yang dihadapi umat muslim di Papua Nugini:

1. Problematika Internal

Sebagai sebuah gerakan sosial, *Islamic Society of Papua New Guinea* harus memiliki klaim identitas guna mendapatkan legitimasi masyarakat lokal maupun internasional. Sebelum tahun 1983, ISPNG belum mendapatkan klaim identitas dari pemerintahan Papua Nugini. Kondisi ini turut memengaruhi respons dari organisasi-organisasi internasional terhadap ISPNG, seperti saat seorang utusan dari Darul Ifta di Sydney,

⁷ Mobinah Ahmad, ‘Significant Timeline of Dr Qazi Ashfaq Ahmad’, *Australian Muslim Times*, 2022 diakses tanggal 14 Februari 2025 pada laman amust.com.au/.

⁸ R. A. Schermerhorn, ‘Toward a General Theory of Minority Groups’, *Clark Atlanta University*, 25.3 (1964), hlm. 246, diakses tanggal 24 November 2024 pada laman jstor.org/273779/.

⁹ Franco Zacco, ‘The Challenges Facing Islam in Papua New Guinea’, *PNG Attitude*, 2014, dikutip tanggal 8 Mei 2025 pada laman pngattitude.com.

¹⁰ Howard Becker, *Outsiders: Studies in The Sociology Of Deviance* (New York: The Free Press, 1963) hlm. 9, diakses tanggal 24 November 2024 pada laman monoskop.org/2/2b/Becker_Howard/.

Shafiqur Rahman, mengunjungi Port Moresby dan Lae untuk menilai kemungkinan pemberian hibah yang ditujukan bagi pembelian properti dan pembangunan pusat studi Islam di Papua Nugini. Pada akhirnya formulir permohonan telah diberikan, namun bantuan yang dimaksud tidak terealisasi. Situasi serupa terjadi pada tahun berikutnya, ketika Muhammad bin Qu'ud dari Darul Ifta, Riyadh, Arab Saudi, menjanjikan bantuan finansial, yang pada akhirnya juga tidak terwujud. Salah satu penyebab utama dari kegagalan tersebut diduga kuat karena jumlah Muslim yang terlalu sedikit, sehingga menimbulkan keraguan dari pihak luar untuk menyalurkan bantuan.¹¹

Pada konteks yang lebih luas, pengakuan suatu agama oleh negara sangat penting untuk menjamin pelaksanaan hak-hak keagamaan. Rowan Williams menyatakan bahwa negara dapat bersikap netral terhadap agama, yakni dengan tidak memihak agama tertentu dan memberi ruang bagi semua keyakinan untuk berkontribusi dalam kegiatan publik. Suatu negara juga bisa bersifat selektif dalam meresmikan agama bahkan dapat menghapus ekspresi keagamaan dari ruang publik sepenuhnya.¹² Pengakuan terhadap agama Islam di Papua Nugini tidak terlepas dari dinamika ini, di mana prosesnya dipenuhi oleh konflik eksternal, termasuk kontra dari institusi keagamaan mayoritas dan sebagian masyarakat lokal.

Sebelum tahun 1987, umat Muslim di Papua Nugini belum mendapatkan rumah ibadah yang layak. Keberadaan masjid sebagai tempat ibadah tidak hanya berfungsi sebagai aspek keagamaan, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial dan simbol eksistensi Muslim dalam ruang publik. Pembangunan masjid sering kali menjadi kendala karena jumlah penganut untuk mendirikan suatu tempat ibadah tergolong masih sedikit.¹³ Saat ini Papua Nugini memiliki *Islamic Centre* atau Masjid yang berlokasi di Hohola, Port Moresby. Masjid yang dibangun pada tahun 1999 ini menjadi pusat dakwah dan aktivitas keagamaan yang berada di bawah pembinaan langsung *Islamic Society of Papua New Guinea*.

Meskipun demikian, semangat beribadah umat Muslim di Papua Nugini tidak surut. Para Muslim di Papua Nugini tetap menjalankan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Aktivitas seperti piknik bersama dan shalat berjamaah dilakukan di berbagai tempat terbuka, seperti museum, taman nasional, pantai, hingga halaman gedung parlemen. Keberadaan mereka yang menunaikan ibadah secara terbuka sering kali menarik perhatian warga lokal non-

¹¹ Mohammad Choudry Afzal, 'My Memories of Islam in Papua New Guinea', *Islamic Society of Papua New Guinea Official Website*, 2008, diakses tanggal 28 Maret 2025. pada laman <https://ispng.com/articles/>.

¹² Kyriaki Topidi, *State Recognition and Religious Minority Group Agency in a European Context* (The European Centre for Minority Issues, 2022) hlm. 115 dikutip tanggal 21 April 2025 researchgate.net/363454966/.

¹³ Arifinsyah dan Ahmad Sofian, 'Regulation on Worship House Establishment and Implication Toward Minority Relation of Religious People Majority in Indonesia', *International Journal of Social Sciences*, 2021, hlm. 113 dikutip tanggal 20 April 2025 pada laman neliti.com/410871/.

Muslim, menandakan betapa eksistensi umat Islam menjadi sesuatu yang tidak lazim di tengah masyarakat mayoritas non-Muslim.



Gambar 1 Pelaksanaan sholat ied pada tahun 1982

Sumber: Catatan Perjalanan Choudry, dikutip pada laman <https://ispng.com/articles/>

Selain problematika dalam ibadah dan pendidikan, umat Muslim di Papua Nugini juga menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi yang sesuai syariat, seperti ketersediaan makanan halal. Pada negara-negara dengan populasi Muslim minoritas, akses terhadap makanan yang disembelih menurut aturan Islam sering kali terbatas. Meski terdapat keringanan berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang menyebut bahwa seorang Muslim boleh menyebut nama Allah sebelum makan daging yang diberikan oleh non-Muslim, selama tidak diketahui secara pasti bahwa daging itu disembelih untuk selain Allah SWT.¹⁴

Keinginan untuk memperoleh daging yang benar-benar disembelih sesuai syariat Islam tetap menjadi keinginan dan tekad kuat umat Islam di Papua Nugini. Seiring dengan meningkatnya populasi Muslim pada tahun 2001, permintaan terhadap daging halal juga mengalami peningkatan. *Islamic Society of Papua New Guinea* merespons kebutuhan tersebut dengan menjalin kerja sama dengan *Ilimo Dairy Farm*, peternakan terdekat dari Port Moresby, untuk menyembelih ayam sesuai dengan syariat Islam dalam jumlah besar. Proses dan tahapan yang dilalui dalam upaya ini akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Kesulitan serupa juga dirasakan pada perayaan hari besar Islam, seperti Idul Adha. Proses penyembelihan hewan qurban di negara dengan jumlah Muslim minoritas menghadapi beragam kendala, mulai dari keterbatasan hewan, ketiadaan lembaga pengelola qurban, hingga hambatan sosial yang melaksanakan ibadah qurban secara terbuka.¹⁵ Realitas ini menunjukkan bahwa kehidupan beragama bagi Muslim minoritas di Papua Nugini tidak hanya berkutat pada problematika

¹⁴ Muhammad Saalih Al-Munajjid, 'Conditions of Eating Meat Slaughtered by Jews and Christians', *Islam Question and Answer*, 2023 dikutip tanggal 21 April 2025 pada laman islamqa.info/88206/.

¹⁵ Adel Ibrahim A. Alturki, Jamal, and Ahmad Wasito, 'Good Muslims and Good Citizens: How Fiqh Al-Aqalliyat Solves The Problems of Muslim Minorities in the West', *Peradaban Journal of Religion and Society*, 2.1 (2023) hlm. 88, dikutip tanggal 22 April 2025 pada laman jurnal.peradabanpublishing.com/.

keagamaan, melainkan juga berkaitan dengan dimensi sosial, budaya, dan ekonomi yang membentuk dinamika kehidupan sehari-hari.

2. Problematika Eksternal

Keberadaan umat Muslim di Papua Nugini menimbulkan beberapa respon sosial dari berbagai kalangan. Salah satunya ancaman dari kalangan politik dan pemerintahan. *Islamic Society of Papua New Guinea* dipandang sebagai ancaman terhadap para pemimpin Gereja yang memiliki pengaruh signifikan dalam struktur pemerintahan. Pemerintahan Papua Nugini yang sebagian besar ialah pengurus Gereja, menyatakan bahwa pemerintah merasa khawatir terhadap Islam, karena dianggap sebagai utusan dari Ayatullah Khomeini. Selain itu, peristiwa Revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini kerap diidentifikasi sebagai peristiwa keagamaan yang ekstrem, sehingga memberikan kontribusi terhadap pembentukan citra negatif terhadap Islam, khususnya di mata pemerintah Papua Nugini.¹⁶

Kekhawatiran serupa juga muncul sebagai respons terhadap sosok Mu'amar Gaddafi, presiden Libya yang dikenal karena pendekatan otoriter dan penggunaan kekerasan dalam kepemimpinannya. Sensitivitas terhadap Gaddafi tercermin dari ditolaknya paspor Libya di beberapa negara, termasuk Australia. Salah satu peristiwa yang memperkuat persepsi negatif tersebut ialah insiden penembakan pada 17 April 1984, saat demonstrasi di depan Kedutaan Besar Libya di London, yang mengakibatkan tewasnya seorang polisi wanita Inggris, Yvonne Fletcher. Insiden tersebut memicu ketegangan diplomatik antara Inggris dan Libya serta turut memengaruhi persepsi terhadap negara-negara Islam.¹⁷

Keterlibatan *Islamic Society of Papua New Guinea* dalam konferensi tersebut menarik perhatian negara-negara peserta, termasuk Libya. Kedutaan besar Libya menawarkan bantuan dana sebagai bentuk dukungan. Meski menyambut baik itikad tersebut, pihak *Islamic Society of Papua New Guinea* dengan penuh hormat meminta agar bantuan tersebut disalurkan atas nama RISEAP, bukan pemerintah Libya, guna menghindari kecurigaan politik. Pada akhirnya, Libya memberikan sumbangan berupa mesin fotokopi, mesin ketik, dan uang sebesar 3000 USD melalui nama RISEAP.

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1987, komunitas Muslim Papua Nugini menerima kunjungan dari Akbar Muhammad, perwakilan *National of Islam United States* yang sebelumnya mengadakan kunjungan ke Libya. Kegiatan mereka meliputi diskusi keislaman dan salat Magrib berjamaah di hotel tempat Akbar menginap. Namun, pertemuan tersebut bocor ke publik dan dimanfaatkan oleh pihak yang sejak

¹⁶ U.S Embassy Tlibisi, 'The Iranian Regime's 40 Year Campaign of Assassinations', *U.S Embassy*, 2020 diakses tanggal 11 Maret 2025 pada laman ge.usembassy.gov/.

¹⁷ Dominic Casciani, 'Yvonne Fletcher Murder: Libyan Suspect Faces Private Prosecution', *BBC News*, 2024 dikutip tanggal 22 April 2025 pada laman bbc.com/.

awal menentang kehadiran *Islamic Society of Papua New Guinea*. Penolakan juga datang dari tokoh keagamaan seperti Uskup Agung, yang menilai bahwa anggota ISPNG tidak layak mengajar di Universitas Papua Nugini karena dianggap memiliki agenda dakwah terselubung.

Ranah politik dan keagamaan di Papua Nugini pada tahun 1980-an menunjukkan kecenderungan kuat untuk mengaitkan masalah sosial dengan identitas agama. Perdana Menteri Julius Chan menyatakan bahwa tingginya tingkat kriminalitas di negaranya merupakan akibat dari lemahnya pengakuan Papua Nugini sebagai negara Kristen. Ia menegaskan bahwa para pelaku kejahatan berasal dari rakyat itu sendiri. Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana politik memanfaatkan simbolisme agama untuk memperoleh legitimasi dan dukungan masyarakat.¹⁸

Kondisi tersebut menjadikan tantangan serius bagi *Islamic Society of Papua New Guinea*. Akses mereka dalam menjalankan kegiatan dakwah mengalami hambatan karena fasilitas umum, termasuk sarana publikasi, dikelola oleh institusi-institusi yang berafiliasi dengan kekuatan agama dominan dalam dunia politik. Pada tahun 1984, pihak *Islamic Society of Papua New Guinea* berencana mencetak artikel singkat dalam empat lembar kertas sebagai bagian dari kegiatan penyebaran informasi Islam. Namun, usaha tersebut ditolak secara sepihak tanpa alasan yang jelas, mengingat pada masa itu sebagian besar percetakan berada di bawah kepemilikan lembaga gereja.¹⁹

Situasi diskriminatif juga terjadi pada saat pembangunan masjid di Port Moresby. Tokoh-tokoh seperti Pastor Lapa secara terang-terangan menyerukan larangan terhadap komunitas Muslim di Papua Nugini. Sementara itu, parlemen terlibat dalam perdebatan tentang tafsir kebebasan beragama dalam konstitusi, dengan beberapa pihak mempertanyakan apakah kebebasan tersebut berlaku juga bagi agama Islam atau tidak. Meskipun demikian, dukungan terhadap prinsip kebebasan beragama tetap muncul dari para Dewan Papua Nugini, yang pandangannya mendapat sorotan positif dari media massa.²⁰

Penolakan terhadap keberadaan Muslim juga tampak secara sosial di tingkat masyarakat. Ketika *Islamic Society of Papua New Guinea* untuk pertama kalinya membeli sebuah bangunan untuk dijadikan masjid di kawasan Cobreosea, Port Moresby, muncul penolakan tersirat dari tetangga sekitar. Salah satu bentuknya terjadi saat keluarga keturunan Australia yang tinggal di sekitar lokasi secara konsisten membunyikan radio dengan volume tinggi pada saat adzan dikumandangkan, sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap aktivitas Muslim.

¹⁸ Philip Gibbs, *Political Discourse and Religious Narratives of Church and State in Papua New Guinea* (Goroka, 2005) hlm.14, dikutip tanggal 28 April 2025 pada laman repository.anu.edu.au/3136876/.

¹⁹ *Op.Cit.*, Choudry, dikutip tanggal 28 April 2025.

²⁰ *Op.Cit.*, Phillip Gibbs, dikutip tanggal 28 April 2025.

Tantangan dalam berdakwah tidak hanya berasal dari masyarakat luar, tetapi juga muncul di lingkungan keluarga para mualaf. *Islamic Society of Papua New Guinea* menghadapi penolakan serta ancaman dari pihak keluarga yang tidak menerima kerabat mereka berpindah agama. Sebagai contoh, pada tahun 1987, keluarga Jaffar, salah seorang mualaf asal Papua Nugini, menyatakan ketidaksetujuannya secara terbuka. Bahkan mereka melaporkan *Islamic Society of Papua New Guinea* kepada Rektor Universitas Papua Nugini dengan tuduhan bahwa organisasi tersebut melakukan penyebaran praktik ilegal secara terselubung.

C. Upaya *Islamic Society of Papua New Guinea* dalam Menyelesaikan Problematika Muslim Minoritas di Papua Nugini

1. Klaim Identitas

Sebagai upaya klaim identitas, pada bulan April 1981, *Islamic Society of Papua New Guinea* mengajukan permohonan registrasi ke Kantor Pendaftaran Umum Papua Nugini. Sebagai bagian dari upaya sosialisasi, perwakilan ISPNG, Afzal Choudry, juga diwawancarai oleh radio nasional Papua Nugini, mengingat pada saat itu stasiun televisi di negara tersebut masih sangat terbatas. Tentunya proses pengajuan pengakuan resmi tidak berjalan dengan mudah. *Islamic Society of Papua New Guinea* menghadapi berbagai tantangan, termasuk adanya keberatan dari Menteri Kehakiman Papua Nugini saat itu, Paul Torato. Atas opini pribadi ia menganggap bahwa Islam bertentangan dengan konstitusi Papua Nugini, mengajarkan ekstremisme, merupakan agama yang tidak bermoral, serta berpotensi menimbulkan konflik sosial di antara masyarakat setempat jika dibiarkan berkembang.²¹

Tuduhan tak berdasar tersebut tak membuat ISPNG menyerah, dan kembali mendaftarkan organisasi Islam ini pada Desember 1981. Akan tetapi, pada 1 Januari 1982, Perdana Menteri Papua Nugini saat itu, Julius Chan, juga menyatakan ketidaksetujuannya dan tidak mengizinkan Islam masuk di Papua Nugini, melalui siaran radio. Ketika mendengar adanya ancaman, *Islamic Society of Papua New Guinea* mengirimkan surat kepada Julius Chan dengan tujuan untuk berkomunikasi secara damai.²² Namun karena alasan lain Julius digantikan oleh Michael Somare.

Relasi internasional muncul sebagai titik terang pada penghujung tahun 1982, ketika kunjungan tidak terencana dari Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, yang saat itu baru saja menghadiri pertemuan pimpinan Persemakmuran di Fiji, membawa kabar baik bagi Muslim di Papua Nugini.²³ Hubungan persahabatan antara Mahathir Mohamad dan Michael Somare, Perdana Menteri Papua Nugini pada

²¹ Rugby League, 'Boicot Thread Are Paul Torato', *The Canberra Times*, 1981, hlm. 22 diakses tanggal 14 Februari 2025 pada laman trove.nla.gov.au/.

²² Rugby League, 'Boicot Thread Are Paul Torato', *The Canberra Times*, 1981, hlm. 22 diakses tanggal 14 Februari 2025 pada laman trove.nla.gov.au/.

²³ Chrismoffat, 'Interview with Tun Dr Mahathir Bin Mohamad', *Commonwealth Oral History Project*, 2015, diakses tanggal 14 Maret 2025 pada laman commonwealthoralhistories.org/.

masa itu, menjadi peluang bagi *Islamic Society of Papua New Guinea* untuk memperjuangkan legitimasi mereka sebagai organisasi keagamaan. Pertemuan antara Mahathir dan perwakilan *Islamic Society of Papua New Guinea* membuka ruang dialog mengenai hambatan yang dihadapi Muslim di Papua Nugini, terutama keinginan untuk memperoleh status resmi dari pemerintah. Mahathir tidak hanya menyimak keluhan mereka, tetapi juga turut membantu membujuk Michael Somare. Somare kemudian menyatakan kesediaannya untuk meresmikan *Islamic Society of Papua New Guinea*, tetapi menunggu ketegangan dari tokoh-tokoh gereja dalam pemerintahan tentang islam mereda.



Gambar 2 Kunjungan Pertama Mahathir 1982

Ket: kiri-kanan Mahathir dan istrinya, Choudry dan istrinya

Sumber: Catatan Perjalanan Choudry, dikutip pada laman <https://ispng.com/articles/>

Upaya meresmikan *Islamic Society of Papua New Guinea* memperoleh momentum yang tepat pada 10 November 1983. Luke Lukas dari Departemen Kehakiman menghubungi pihak *Islamic Society of Papua New Guinea* untuk segera melengkapi proses pendaftaran organisasi, sebab Michael Somare dijadwalkan melakukan kunjungan resmi empat hari kemudian. Proses pendaftaran sempat mengalami kendala administratif, terutama pada bagian dari proposal, yang menyebutkan bahwa jika *Islamic Society of Papua New Guinea* gagal atau dibubarkan, maka seluruh asetnya akan disumbangkan kepada *Australian Federation of Islamic Councils* (AFIC). Organisasi AFIC, yang didirikan pada tahun 1976, merupakan lembaga Islam berskala nasional di Australia. Lembaga ini menaungi dewan-dewan Islam yang tersebar di setiap negara bagian, dan setiap dewan terdiri atas sejumlah perkumpulan Islam.²⁴

Keberatan muncul dari kepala pendaftaran umum yang menilai tidak layak jika kekayaan organisasi asal Papua Nugini dialihkan ke luar negeri. Sebagai respons atas keberatan tersebut, pihak *Islamic Society of Papua New Guinea* melakukan revisi pada bagian tersebut dan menggantinya dengan pernyataan bahwa jika *Islamic Society of Papua New Guinea* dibubarkan, maka aset yang tersisa akan disumbangkan kepada organisasi amal di Papua Nugini. Proses revisi yang cepat dan responsif ini membuat

²⁴ Siti Ambiah dan Dedeh Nur Hamidah, 'Peran Komunitas Muslim Australia dalam Perkembangan Islam Di Australia Abad 20M', *Tamaddun*, VII.1 (2019) hlm. 202 dikutip tanggal 24 April 2025 pada laman syekhnurjati.ac.id/.

kepala pendaftaran umum menandatangani proposal pendaftaran pada 11 Desember tahun 1983, yang kemudian segera ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat *Islamic Society of Papua New Guinea* sebagai organisasi Islam resmi di Papua Nugini. Hal tersebut menjadi peristiwa membahagiakan sekaligus langkah awal bagi *Islamic Society of Papua New Guinea* dalam menjalankan dakwah Islam.²⁵ Fenomena tersebut sesuai dengan teori gerakan sosial dengan klaim identitas sebagai sebuah organisasi Islam di Papua Nugini.

2. Upaya Dakwah Islam

Berdasarkan teori Islamisasi, proses penyebaran Islam di Papua Nugini mengikuti pola Islamisasi kultural, di mana ajaran Islam diterima bukan melalui paksaan. Salah satu strategi dakwah yang dilakukan oleh *Islamic Society of Papua New Guinea* adalah penerbitan buletin berjudul *Al-Islam*. Media tersebut berfungsi sebagai sarana publikasi sekaligus edukasi mengenai ajaran Islam. Edisi pertama *Al-Islam* diterbitkan pada Februari 1984 dengan jumlah 100 cetakan. Selama kurun waktu empat tahun, buletin ini mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 800 cetakan pada edisi terakhirnya di tahun 1988.

Tahun 1984 menandai datangnya beberapa tokoh Muslim migran yang turut memperkuat dakwah *Islamic Society of Papua New Guinea*. Beberapa di antaranya adalah Eltayyeb dari Sudan, Azeemullah dari Fiji, dan Hameed dari Malaysia. Kehadiran mereka tidak hanya memperluas jaringan Muslim di Papua Nugini, melainkan juga memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan strategi dakwah di Papua Nugini.



Gambar 3 El-Tayyeb Sebelah Kanan

Sumber: <https://ispng.com/articles/>

Pada tahun 1985, *Islamic Society of Papua New Guinea* menerbitkan artikel tentang “Alasan Mengapa Minum Alkohol dan Makan Daging Babi Dilarang dalam Islam”. Artikel ini mampu menarik perhatian Alexander Dawia, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan sejarah di Universitas Papua Nugini. Ketertarikan tersebut mendorongnya untuk mempelajari Islam lebih dalam. Dedikasi para anggota *Islamic*

²⁵ *Op.Cit.*, Flower, 2009, hlm.256.

Society of Papua New Guinea tercermin dari respons mereka terhadap semangat belajar Alexander. Ketika Alexander merencanakan perjalanan penelitian ke Australia namun masih bertekad untuk mendalami tentang Islam, maka Ashfaq Ahmad yang bermukim di Sydney, bersedia memfasilitasi tempat tinggal dan mengajaknya berkunjung ke beberapa masjid di kota tersebut. Pendekatan ini memberikan pengalaman spiritual yang mendalam bagi Alexander Dawia.

Interaksi intens dengan Ashfaq Ahmad memperkuat keyakinan Alexander untuk memeluk Islam. Ia pun menghubungi Choudry, sekretaris Islamic Society of Papua New Guinea, dan menyampaikan keinginannya untuk bersyahadat di Port Moresby. Namun, Choudry menyarankan agar keputusan baik tersebut tidak ditunda. Akhirnya, pada 18 Januari 1986, Alexander mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Jami Sydney. Sambutan hangat dari komunitas Muslim di sana, termasuk dari kalangan Muslim kulit putih, membuatnya terkesan. Hal ini berbeda dengan pengalamannya di Papua Nugini, di mana interaksi sosial berbeda ras sangat terbatas. Alexander juga diceritakan tentang kisah Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Muhammad SAW yang berkulit hitam dan merupakan muazin pertama dalam Islam. Kabar keislaman Alexander menginspirasi Lavi-Ali, anak angkat Sadiiq, untuk mengikuti jejaknya. Ia pun mengucapkan syahadat pada hari berikutnya, sehingga jumlah mualaf asli Papua Nugini mulai bertambah.



Gambar 4 Dua orang mualaf pertama Papua Nugini
Ket: Alexander Dawia (kanan) dan Lavi-Ali (kiri)
Sumber: <https://ispng.com/articles/>

Usai kembali ke Port Moresby pada Februari 1986, Alexander mengutarakan keinginan untuk tinggal bersama saudara Muslim untuk sementara, karena merasa segan terhadap keluarganya yang beragama Kristen. Azeemullah, yang saat itu tinggal sendiri karena keluarganya berada di Fiji, menawarkan tempat tinggal untuk Alexander. Ia bahkan membimbing Alexander dalam belajar sholat. Progres belajar Alexander sangat cepat, hingga ia menjadi delegasi Papua Nugini dalam konferensi RISEAP di Malaysia. Keikutsertaannya diberitakan sebagai “Muslim Pertama dari Papua Nugini.” Ia juga memperoleh berbagai kesempatan kerja dari institusi Muslim

di luar negeri, seperti Universitas Islamabad, Pakistan, yang kemudian memperluas relasinya.

Keberadaan buletin Al-Islam semakin memperkuat pengaruh dakwah Islamic Society of Papua New Guinea. Salah satu peristiwanya terjadi ketika Choudry, Sekretaris Umum ISPNG saat itu, sedang dalam perjalanan menuju kantor dan menumpangi seorang pustakawan bernama Barra Nuli. Saat berada di mobil, Barra membaca Al-Islam dan menunjukkan ketertarikan. Ia kemudian meminta edisi terbaru buletin tersebut, yang diantarkan langsung oleh Alexander. Pada kesempatan itu, Alexander juga diperkenalkan sebagai mualaf pertama asal Papua Nugini. Ketertarikan tersebut mendorong Barra dan keluarganya untuk berdiskusi lebih jauh mengenai Islam di rumah Azeemullah. Pada akhir tahun 1986, Barra, istri, dan anaknya resmi memeluk Islam. Fatimah, istri Barra, tercatat sebagai perempuan Papua Nugini pertama yang menjadi Muslimah.



Gambar 3 Keluarga mualaf pertama di Papua Nugini

Ket: Barra Nuli dan Margaret berganti menjadi Fatimah

Sumber: <https://ispng.com/articles/>

Proses dakwah Islamic Society of Papua New Guinea menghasilkan mualaf dari kalangan terdidik, yang secara aktif turut menyebarkan dakwah Islam. Salah satunya adalah Barra, yang memiliki rekan kerja bernama Salmang. Ia memutuskan untuk memeluk Islam pada tahun 1987 setelah berdiskusi panjang mengenai Islam dengan Barra. Istri Salmang yang semula merupakan penganut Katolik yang taat, juga masuk Islam setahun kemudian. Selain itu, terdapat Umar Nabai yang juga seorang pustakawan Universitas Papua Nugini.



Gambar 4 Umar Nabai (Kanan), Barrrah, Choudry, dan Muhammad Noor

Sumber: <https://ispng.com/articles/>



Gambar 5 Salmang (kanan), Barrrah, Yaqoob Amaki

Sumber: <https://ispng.com/articles/>

Mualaf berikutnya ialah seorang manajer di Departemen Sarana dan Prasarana pemerintahan bernama Khalid, yang mengikuti langkah serupa. Minat Khalid terhadap Islam bermula ketika ia menerima salinan buletin Al-Islam dari dosennya saat mengikuti pelatihan di Politeknik Lae. Ketertarikan tersebut membuatnya menghubungi Choudry untuk berdiskusi lebih lanjut. Setelah komunikasi yang intens, ia akhirnya bersyahadat melalui sambungan telepon dan mulai belajar sholat.



Gambar 6 Khalid (Kiri) berkumpul bersama Choudry dan Amino

Sumber: <https://ispng.com/articles/>

Metode dakwah ISPNG tidak terbatas pada buletin atau artikel. Teknik naratif seperti kisah Bilal bin Rabah dan referensi kepada tokoh internasional seperti Ahmad Deedat turut digunakan. Video dakwah Ahmad Deedat menjadi salah satu media audio visual yang paling efektif untuk dakwah di Papua Nugini. Sebagai anggota Islamic Society of Papua New Guinea, Azeemullah secara perlahan mengajak atasannya Pak Amaki untuk menonton video-video Ahmad Daeedat. Setelah beberapa waktu, Amaki dan istrinya memutuskan untuk masuk Islam. Ahmed Deedat adalah pendakwah Muslim yang sangat berpengaruh secara global. Ia masih menerima permintaan buku dan rekaman dari berbagai negara, bahkan setelah wafat. Namanya muncul di lebih dari sejuta situs web.



Gambar 7 Keluarga mualaf Amaki, Khadijah (istri) dan Ishaq (anak)

Sumber: <https://ispng.com/articles/>

Video Ahmad Deedat menjadi semakin populer dan Choudry berencana untuk menggandakan video tersebut agar dapat disebarakan lebih luas. Secara kebetulan, seorang staf bagian audio visual bernama Wanjemanker menonton video dakwah itu saat ia sedang menyalin rekaman. Ia kemudian mulai berdiskusi tentang Islam dengan rekan-rekannya pada waktu luang. Setelah beberapa bulan, hati Wanjemanker tersentuh, dan ia memutuskan untuk memeluk Islam bersama temannya. Wanjemanker memilih nama Islam Jaffar, sementara temannya memilih nama Abid.

Penyebaran agama Islam di Papua Nugini bukanlah hal yang mudah, tetapi tetap dijalankan oleh para anggota Islamic Society of Papua New Guinea secara damai dan penuh kehati-hatian. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik sebagian masyarakat lokal yang cenderung memanfaatkan ajaran agama demi memperoleh bantuan materi. Salah satu tokoh yang menghadapi tantangan tersebut adalah Mikail Abdul Aziz. Ia memiliki semangat tinggi dalam berdakwah dan kerap menggunakan dana pribadinya untuk membangun hubungan sosial dengan warga lokal.

3. Klaim Program Pembangunan *Islamic Centre*

Sebagai klaim program dalam teori gerakan sosial, Islamic Society of Papua New Guinea bertekad untuk membangun sebuah majelis sebagai pusat ibadah dan pendidikan Islam. Upaya ini mendapat dukungan dari El-Tayyeb yang merekomendasikan Ahmad Totonji, seorang tokoh Muslim internasional yang dianggap memiliki kapasitas untuk membantu pendanaan pembangunan Islamic Centre. Setelah berkomunikasi melalui sambungan telepon dan menyampaikan rencana Islamic Society of Papua New Guinea, Totonji menyatakan kesediaannya untuk menanggung setengah dari total biaya pembangunan serta memberi gaji untuk seorang imam yang juga berperan sebagai guru mengaji.

Ahmad Totonji merupakan warga negara Arab Saudi kelahiran Kurdistan, Irak, yang menempuh pendidikan di Inggris. Ia merupakan salah satu pendiri Muslim Students Association pada awal 1960-an dan pernah menjabat sebagai asisten sekretaris jenderal World Assembly of Muslim Youth (WAMY). Kepedulianya terhadap perkembangan Islam di Papua Nugini tercermin dari keputusannya untuk mengirim seorang imam, bernama Yusuf Popat, dari Afghanistan. Namun, keberangkatan Yusuf Popat tertunda karena Islamic Society of Papua New Guinea belum menentukan bangunan yang akan dijadikan masjid, mengingat harga properti saat itu sangat tinggi.

Setelah meninjau sejumlah lokasi, Islamic Society of Papua New Guinea tertarik pada bangunan bekas kantor Air Nugini dengan harga 65.000 kina. Sebagai langkah awal, mereka membayar uang muka sebesar 10.000 kina dan berkomitmen untuk melunasi sisanya dalam waktu enam bulan. Melalui dukungan Totonji yang menanggung 50% dari biaya, para anggota Islamic Society of Papua New Guinea secara aktif menggalang dana dari jejaring relasi mereka di berbagai negara.

Presiden Islamic Society of Papua New Guinea saat itu, Mohammad Shamsul Alam Chowdhury, menyusun proposal permohonan dana dan menyebarkannya secara luas hingga mencapai Hong Kong, Kanada, Singapura, dan Inggris. Selama empat bulan upaya pengumpulan dana dilakukan, Islamic Society of Papua New Guinea masih mengalami kekurangan dana sebesar 15.000 dolar Amerika. Agar memenuhi kekurangan tersebut, Islamic Society of Papua New Guinea menghubungi Presiden World Assembly of Muslim Youth WAMY kala itu, Kamaruddin Noor, dan

menjelaskan kesulitan yang dihadapi. Karena tidak memiliki dana cadangan, Kamaruddin bersedia meneruskan proposal tersebut kepada relasinya di Jeddah. Proposal akhirnya sampai ke meja Sekretaris Umum di Jeddah, dan secara tak terduga, seorang pria yang tidak ingin disebutkan namanya mendonasikan dana sebesar 15.000 dolar melalui cek. Identitas penyumbang tetap tidak diketahui, namun Islamic Society of Papua New Guinea menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas bantuan tersebut.

Berbekal dukungan dari berbagai pihak, Muslim di Papua Nugini akhirnya memiliki mushola pertama yang berlokasi di Corobosea, Port Moresby. Fasilitas ini tidak hanya digunakan untuk sholat berjamaah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan Islam. Program-program seperti pengajaran bahasa Arab oleh El-Tayyeb, tafsir Al-Qur'an, serta materi dasar tentang ajaran Islam mulai diselenggarakan secara rutin.

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan kedatangan Mikail Abdul Aziz, seorang pendidik lulusan pascasarjana dari Universitas Islam Madinah. Ia direkomendasikan oleh Ahmad Totonji untuk mengisi peran sebagai imam sekaligus guru. Mikail memulai berbagai kegiatan keislaman seperti kelas Al-Qur'an, kuis Islam, serta pengajaran dasar Islam untuk anak-anak. Karena lokasi mushola ini cukup jauh dari pusat kota, maka sebagian kegiatan tersebut juga dilakukan di Kantor Tata Usaha Universitas Papua Nugini. Semangat Mikail dalam mengembangkan pendidikan Islam di Papua Nugini sangat tinggi. Ia menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Madinah untuk mengirim sejumlah Muslim lokal guna melanjutkan studi di luar negeri. Upaya ini membuahkan hasil dengan kedatangan perwakilan Universitas Islam Madinah pada tahun 1990 yang kemudian menyeleksi beberapa calon mahasiswa dari Papua Nugini.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan muslim di Papua Nugini, muncul keinginan untuk memiliki masjid yang lebih besar dan lahan pemakaman khusus Muslim. Menanggapi hal ini, Muhammad Yusuf selaku presiden Islamic Society of Papua New Guinea mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk penyediaan lahan pemakaman. Permohonan tersebut disetujui, namun usulan pembangunan masjid baru yang lebih luas, sempat menuai penolakan dari beberapa lembaga gereja setempat. Meskipun mendapat tantangan, Muhammad Yusuf tidak menyerah. Ia menghubungi seorang Komisioner Tinggi Malaysia untuk bersama-sama melakukan diskusi dengan Menteri Pertahanan asal Belanda, Tuan Hugo. Dukungan yang diberikan Tuan Hugo sangat berarti, beliau menyetujui pemberian lahan seluas tiga setengah hektar di daerah Hohola. Lahan ini kemudian menjadi pusat kegiatan utama umat Muslim di Papua Nugini hingga saat ini.

Pada tahun 1992, pemerintah Papua Nugini menghibahkan sebidang tanah seluas 3.500 meter persegi yang terletak di Hohola, tepatnya di luar kompleks kantor KBRI untuk pembangunan masjid pertama di Papua Nugini. Namun, realisasi pembangunan tidak dapat segera dilakukan karena keterbatasan dana. Pada tahun

1996, Duta Besar Republik Indonesia di Port Moresby mengajukan permohonan bantuan kepada Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila, yang kemudian disetujui melalui pengiriman dana sebesar 100.000 dolar AS ke Port Moresby, dan selanjutnya diserahkan kepada pengurus *Islamic Society of Papua New Guinea*.²⁶

Pembangunan masjid secara resmi dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Duta Besar RI pada tahun 1999, dan selesai pada tahun 2001. Peresmian masjid dilakukan oleh Duta Besar RI mewakili Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila, *High Commissioner Malaysia* mewakili Maybank Malaysia, dan Imam Mikail Abdul Aziz mewakili *Muslim World League dari Arab Saudi. Islamic Centre*. Masjid ini memiliki luas bangunan 1.000 meter persegi dengan kapasitas sekitar 1.000 jamaah, serta dilengkapi fasilitas penunjang seperti sistem suara, karpet tebal, kipas angin permanen, dan tempat wudhu.²⁷



Gambar 10 Masjid Hohola, Port Moresby

Sumber: <https://ispng.com/articles/>

Rencana pembangunan *Islamic Centre* atau Masjid di kawasan Hohola, Port Moresby, tidak langsung memperoleh penerimaan tanpa penolakan. Sejumlah tokoh masyarakat dan politisi terlibat dalam perdebatan melalui media massa. Salah satunya adalah Menteri Dalam Negeri Papua Nugini, Andrew Kumbakor, yang menyusun dokumen berjudul *The Incursion of Islam into Papua New Guinea: A Warning*, berisikan tentang pernyataan bernada merendahkan, menyesatkan, dan provokatif terhadap Islam.

Menghadapi ancaman tersebut, *Islamic Society of Papua New Guinea* meminta bantuan kepada *Islamic Human Rights Commission* (IHRC) agar eksistensi Islam tidak terancam dihapus dari Papua Nugini. IHRC kemudian mendorong agar Menteri Persemakmuran segera mengambil tindakan efektif terhadap pemerintah Papua Nugini untuk mencegah pengesahan undang-undang atau amandemen diskriminatif tersebut. Negara dinilai perlu bertindak cepat guna mencegah maraknya pengucilan dan penghinaan terhadap kelompok minoritas. Akhirnya, Menteri Kumbakor

²⁶ Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila, *Laporan Dan Dokumentasi Dana*, 2015, dikutip tanggal 13 Mei 2025 pada laman yamp.or.id/

²⁷ Hendra Gunawan, 'Masjid Hohola Port Moresby', *Masjidinfo*, 2011, dikutip tanggal 13 Mei 2025 pada laman masjidinfo.net/.

mengundurkan diri karena tuduhan korupsi, dan amandemen konstitusi yang direncanakan tidak terealisasi.²⁸

Selain melalui media massa, ancaman terhadap eksistensi *Islamic Centre* di Papua Nugini juga diwujudkan melalui tindakan kekerasan fisik. Sebuah upaya pembakaran terjadi ketika seorang penyusup merusak pagar besi dan memasuki area masjid lalu membakar sebagian bangunan. Aksi tersebut berhasil digagalkan dan api yang belum sempat menyebar luas segera dipadamkan. Selain itu Masjid Hohola pernah mengalami serangan bom peluru yang dibuktikan dengan adanya lubang peluru pada salah satu jendela. Hal tersebut menunjukkan bahwa intimidasi terhadap Muslim di Papua Nugini tidak hanya bersifat verbal tetapi juga mencakup kekerasan langsung yang membahayakan keselamatan dan tempat ibadah mereka.²⁹

Meskipun menghadapi berbagai ancaman, *Islamic Centre* ini masih berdiri kokoh dan menunjukkan perkembangan fisik yang signifikan. Bangunannya kini tampak lebih megah dengan dua menara yang dapat terlihat dari kawasan perbukitan Halola. Lantai masjid dilapisi keramik halus dan ditutupi karpet berwarna marun yang memberikan kenyamanan bagi para jamaah. Pada jarak tertentu terdapat garis biru sebagai penanda shaf salat. Ruang untuk jamaah laki-laki dan perempuan dipisahkan dengan sekat pembatas guna menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah.³⁰

4. Mengupayakan Qurban dan Makanan Halal

Pada awal perkembangan Islam di Papua Nugini, belum tersedia gerai makanan halal yang dapat diakses oleh masyarakat Muslim. Sebagai alternatif, mereka membeli daging ayam dari toko swalayan milik penganut Kristen, yang tentu saja tidak disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Menjelang akhir tahun 1980-an, sejumlah Muslim mulai membeli ayam hidup dan menyembeluhnya secara mandiri sesuai aturan agama di halaman rumah masing-masing.

Seiring bertambahnya jumlah penganut Islam pada periode 1986-1987, tidak semua orang merasa nyaman menyembelih hewan dengan tangan sendiri. Situasi tersebut menimbulkan kebutuhan akan sistem penyediaan ayam halal yang lebih praktis dan siap konsumsi. Menanggapi kondisi ini, *Islamic Society of Papua New Guinea* mengambil langkah untuk menjalin kerja sama dengan *Ilimo Farm*, satu-satunya peternakan ayam di Port Moresby saat itu.

Melalui komunikasi intensif, pihak *Islamic Society of Papua New Guinea* menanyakan kemungkinan menyembelih ayam dalam jumlah besar sesuai syariat Islam. Peternakan menyambut baik permintaan tersebut, dengan catatan proses

²⁸ Islamic Human Rights Commission, 'Human Rights & Religious Minorities in Papua New Guinea', *Briefing for Commonwealth Ministers*, 2000, dikutip tanggal 10 Mei 2025 pada laman ihrc.org.uk/.

²⁹ Steve Marshall, 'Growing Numbers Convert to Islam in Papua New Guinea', *Australian Broadcasting Corporation*, 2008, dikutip tanggal 10 Mei 2025 pada laman abc.net.au/.

³⁰ Muhammad Fakhruddin, 'Kegiatan Muslim Papua Nugini Berpusat Di Masjid Halola', *Artikel Harian Republika*, 2005, dikutip tanggal 10 Mei 2025 pada laman ihram.republika.co.id/.

penyembelihan harus dilakukan sendiri oleh komunitas Muslim. Maka disepakati bahwa perwakilan anggota *Islamic Society of Papua New Guinea* akan menyembelih sekitar 200 hingga 300 ekor ayam secara berkala. Ayam-ayam yang telah disembelih kemudian dipisahkan dalam kemasan khusus dan diproses menjadi ayam beku (*frozen chicken*). Upaya ini memberikan kemudahan signifikan bagi masyarakat Muslim untuk memperoleh makanan halal secara praktis dan higienis.

Selain memenuhi kebutuhan pangan, *Islamic Society of Papua New Guinea* juga berusaha agar Muslim di Papua Nugini dapat melaksanakan ibadah Qurban sebagai bagian dari peringatan Hari Raya Idul Adha. Tantangan utama yang dihadapi saat itu adalah keterbatasan persediaan kambing dan domba, yang hanya tersedia di beberapa desa terpencil dengan jarak tempuh sekitar satu jam perjalanan dari Port Moresby.

Sebagai solusi, pada tahun 1981, pelaksanaan Qurban besar pertama berhasil diwujudkan dengan menyembelih seekor sapi. Qurban ini merupakan hasil kerja sama lima keluarga Muslim yang secara kolektif membeli sapi dari Rumah Potong Hewan yang berjarak sekitar 15 mil dari kota. Mereka menjelaskan kepada pihak rumah potong bahwa penyembelihan dilakukan untuk memperingati kisah Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya demi menjalankan perintah Allah SWT.

Pihak rumah potong memberikan izin bagi umat Islam untuk melaksanakan penyembelihan sesuai dengan ketentuan agama. Proses Qurban dipimpin oleh Ateqaad Husain. Saat penyembelihan dimulai dan takbir dikumandangkan, secara mengejutkan sapi yang telah disembelih sempat berdiri kembali dan melarikan diri, namun akhirnya berhasil diamankan. Peristiwa ini menjadi kenangan berharga bagi para Muslim Papua Nugini sebagai tonggak awal pelaksanaan Qurban di negara tersebut.

Seiring dengan berkembangnya peradaban umat Islam di Papua Nugini, pelaksanaan ibadah kurban terbesar tercatat terjadi pada tahun 2019 melalui pendanaan dari komunitas Muslim Malaysia. Sebanyak 28 ekor sapi disembelih sesuai ketentuan syariat Islam oleh para anggota ISPNG di fasilitas pemotongan hewan yang berlokasi di kawasan 9-Mile, Port Moresby, setelah didatangkan dari *Trukai Industries* di kota Lae. Komisaris Tinggi Malaysia, M. Nasri Abdul Rahman, menegaskan bahwa seluruh bagian dari sapi yang disumbangkan diperuntukkan bagi penerima manfaat, dengan distribusi dilakukan di Masjid Hohola dan Bushwara.

5. Respon Lapisan Sosial

Kehadiran Islam di Papua Nugini menimbulkan respon sosial yang beragam, selain beberapa ancaman dan tantangan, justru beberapa masyarakat membandingkan ajaran Islam dengan budaya mereka. Menurut Scott Flower, banyak mualaf Papua Nugini memutuskan untuk memeluk Islam setelah membandingkan ajaran Islam dan Kristen dengan adat serta tradisi lokal yang mereka anut. Islam

dianggap sebagai agama yang paling sejalan dengan nilai-nilai kebudayaan mereka. Pernyataan seorang mualaf bernama Saeed, berusia 24 tahun, menguatkan pandangan tersebut. Ia menyampaikan bahwa Islam memberikan panduan hidup yang menyeluruh. *"Segala hal telah diatur dalam Islam, mulai dari tata cara pernikahan hingga bagaimana mendidik anak. Islam seperti panduan lengkap bagi kehidupan manusia,"* ujarnya.

31

Berdasarkan keterangan para tokoh Muslim di Papua Nugini, terdapat sejumlah alasan yang mendorong masyarakat setempat untuk memeluk Islam. Faktor utama yang mereka sampaikan meliputi perilaku umat Islam yang dinilai terhormat, ajaran yang menolak konsumsi alkohol dan zat memabukkan lainnya, serta pedoman hidup yang dinilai mampu menciptakan keteraturan dan memberikan arah hidup secara menyeluruh bagi para pemeluknya. Selain itu, para pemimpin tersebut meyakini bahwa ajaran dan praktik Islam dianggap lebih selaras dengan nilai-nilai serta adat istiadat tradisional Melanesia jika dibandingkan dengan agama Kristen. Hal ini tercermin dari pandangan mereka terhadap penerimaan Islam atas praktik poligami, pemisahan peran antara laki-laki dan perempuan, serta tradisi memelihara jenggot dan kumis bagi kaum pria.³²

Lapisan sosial di Papua Nugini turut menyoroti sesuatu ketika agama Kristen mulai diperkenalkan. Perbedaan perlakuan tampak nyata, di mana para misionaris kerap menerima sajian makanan yang lebih baik serta mendapatkan posisi duduk di bagian depan gereja saat ibadah, sementara masyarakat lokal memperoleh perlakuan yang lebih sederhana, baik dari segi konsumsi maupun penempatan tempat duduk. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat untuk memandang Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kesetaraan, tanpa memandang warna kulit maupun status sosial.³³

Jumlah mualaf dari kalangan masyarakat asli Papua Nugini terus mengalami peningkatan yang stabil. Hingga tahun 2001, tercatat sebanyak 476 orang telah memeluk Islam. Angka ini menjadi cerminan dari keberhasilan dakwah Islam yang disesuaikan dengan konteks sosial budaya lokal, serta dilandasi pendekatan yang damai dan penuh kesabaran. Jumlah tersebut terus berkembang dan ketika Franco Zacco mengunjungi *Islamic Centre* di Port Moresby pada Februari 2013, ia memperoleh informasi bahwa jumlah umat Muslim diperkirakan mencapai sekitar 4.000 jiwa, di mana tiga perempat di antaranya merupakan warga negara Papua Nugini.³⁴ Data ini

³¹ Scott Flower, 'Conversion to Islam in Papua New Guinea: Preserving Traditional Culture against Modernity's Cargo-Cult Mentality', *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions*, (2015), hlm.61.

³² Paitim Garamut, 'Papua New Guinea Highlands Turning to Islam', *Reposted from Franco Zocca*, 2020, dikutip tanggal 8 Mei 2025 pada postingan [PaitimGaramut/posts/](https://paitimgaramut/posts/).

³³ Scott Flower, 'Christian-Muslim Relations in Papua New Guinea', *The University Of Melbourne Libraries*, 23.2 (2012) dikutip tanggal 31 Mei 2025 pada laman tandfonline.com/.

³⁴ *Op.Cit.*, Zacco, dikutip tanggal 8 Mei 2025.

mengindikasikan bahwa Islam telah diterima secara lebih luas oleh masyarakat setempat, dan umat Muslim melakukannya dengan jalur perdamaian dan diskusi tanpa kekerasan, hal tersebut menjadi contoh dari moral yang dibentuk umat Muslim.

Respons terhadap meningkatnya jumlah mualaf di Papua Nugini memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam komentar-komentar publik dalam unggahan media sosial terkait perkembangan Islam di negara tersebut. Salah satu komentar menyebutkan, *"I heard that members are paid to attend the services at the mosque. That's probably why their member numbers grew swiftly,"* yang mengindikasikan adanya kecurigaan bahwa pertumbuhan jumlah penganut Islam disebabkan oleh imbalan materi.

Tanggapan lain menyebut para mualaf sebagai *"money followers"* atau penganut karena imbalan, bahkan terdapat komentar yang mengaitkan keberadaan Muslim dengan potensi tindakan ekstremisme, seperti *"make sure they don't cause suicide bombers in our country."* Sementara itu, terdapat pula komentar yang mendukung prinsip kebebasan beragama, seperti yang diungkapkan oleh Lucas Kiap, *"any religion can come into PNG. It is for every citizen to join which which religion they prefer."* Artinya agama apapun bisa masuk ke Papua Nugini dan setiap warga negara berhak ikut agama yang mereka sukai, jangan menghakimi.³⁵ Fenomena pro dan kontra ini merupakan hal yang lazim dihadapi oleh umat Muslim minoritas di berbagai negara termasuk Papua Nugini. Selama umat Muslim tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan atau menciptakan kerusakan, serta tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar, maka upaya untuk terus berkembang secara damai dan konstruktif tetap dapat dilakukan.

Pada akhirnya berdasarkan *World Religions Database* yang diterbitkan oleh *Boston University* pada tahun 2020, populasi Muslim di Papua Nugini diperkirakan mencapai sekitar 10.000 jiwa. Jumlah tersebut mencakup para mualaf, yaitu warga lokal yang memeluk agama Islam. Sebagian besar Muslim yang berasal dari luar negeri dan menetap di ibu kota Port Moresby, sedangkan mualaf tersebar di wilayah perkotaan maupun pedesaan, termasuk daerah pegunungan. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan aktivitas dakwah yang dilakukan oleh *Islamic Society of Papua New Guinea*, meskipun jumlah umat Muslim hanya mewakili sekitar 0,2% dari total populasi Papua Nugini yang mencapai sembilan juta jiwa.³⁶

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Papua Nugini, negara di sebelah timur Indonesia yang kaya budaya dan terisolasi secara geografis, memiliki sejarah panjang interaksi dengan penjelajah Eropa sejak abad ke-16. Sebelum kedatangan agama-agama besar, masyarakatnya menganut kepercayaan

³⁵ Op.Cit., Paitim Garamut, dikutip tanggal 8 Mei 2025

³⁶ Op.Cit., United States Department of State, dikutip tanggal 13 Mei 2025.

tradisional berbasis animisme dan roh leluhur. Kristen masuk melalui penjajahan Australia pada awal abad ke-20, sementara Islam diyakini telah hadir lebih awal sejak abad ke-16 melalui hubungan dagang dan politik dengan Kesultanan Tidore. Penyebaran Islam berjalan lambat dan bercampur dengan tradisi lokal, serta sempat terhambat oleh kolonialisme dan dominasi Kristen. Setelah kemerdekaan tahun 1975, migrasi Muslim dari Asia dan Afrika mendorong terbentuknya komunitas Muslim yang lebih terorganisir, hingga berdirinya *Islamic Society of Papua New Guinea* (ISPNG) pada 1978 dan pengakuan resminya pada 1983. ISPNG hadir sebagai wadah umat Islam untuk menjalankan keyakinannya sebagai gerakan keagamaan.

Muslim minoritas di Papua Nugini menghadapi tantangan internal, antara lain terbatasnya akses pendidikan agama, kurangnya masjid, dan sulitnya memperoleh makanan halal. Secara eksternal, Muslim di Papua Nugini menghadapi perlawanan dari beberapa tokoh politik dan agama yang menganggap Islam sebagai ancaman bagi dominasi agama Kristen. *Islamic Society of Papua New Guinea* juga menghadapi penolakan saat mendirikan masjid dan melakukan kegiatan keagamaan secara terbuka.

Upaya yang diwujudkan oleh *Islamic Society of Papua New Guinea* ialah pendirian masjid pertama di Hohola dan penyediaan ayam halal melalui kerjasama dengan peternakan lokal. Walaupun tantangan ekonomi dan sosial masih ada, semangat umat Islam tetap tinggi. ISPNG berperan penting dalam pengembangan kehidupan keagamaan Muslim, termasuk mengorganisir kegiatan seperti ibadah Qurban yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 1981. Untuk mengatasi tantangan eksternal, ISPNG menggunakan pendekatan damai dalam dakwah, dengan fokus pada edukasi dan dialog antarbudaya untuk membangun pemahaman. Kerja sama internasional, termasuk keterlibatan dalam forum-forum dakwah regional, turut membantu memperkuat posisi komunitas Muslim di Papua Nugini dan memastikan perlindungan hak-hak keagamaan mereka.

Referensi

- A.Alturki, Adel Ibrahim, Jamal, and Ahmad Wasito, 'Good Muslims and Good Citizens: How Fiqh Al-Aqalliyyat Solves The Problems of Muslim Minorities in the West', *Peradaban Journal of Religion and Society*, 2.1 (2023)
- Ahmad, Mobinah, 'Significant Timeline of Dr Qazi Ashfaq Ahmad', *Australian Muslim Times*, 2022
- Al-Munajjid, Muhammad Saalih, 'Conditions of Eating Meat Slaughtered by Jews and Christians', *Islam Question and Answer*, 2023
- Arifinsyah, and Ahmad Sofian, 'Regulation on Worship House Establishment and Implication Toward Minority Relation of Religious People Majority in Indonesia', *International Journal of Social Sciences*, 2021
- Becker, Howard, *Outsiders: Studies in The Sociology Of Deviance* (New York: The Free Press, 1963)

Vanesha Akhwa, Didin Nurul Rosidin & Hasbiyallah

- Casciani, Dominic, 'Yvonne Fletcher Murder: Libyan Suspect Faces Private Prosecution', *BBC News*, 2024
- Choudry, Afzal, Mohammad, 'My Memories of Islam in Papua New Guinea', *Islamic Society of Papua New Guinea Official Website*, 2008
- Chrismoffat, 'Interview with Tun Dr Mahathir Bin Mohamad', *Commonwealth Oral History Project*, 2015
- Flower, Scott, 'The Struggle to Establish Islam in Papua New Guinea (1976-83)', *Journal of Pacific History*, 44.3 (2009), 241-60
- Gibbs, Philip, *Political Discourse and Religious Narratives of Church and State in Papua New Guinea* (Goroka, 2005)
- Graeme Hugo, 'Migration in the Middle East and Mediterranean A Paper Prepared for the Policy Analysis and Research Programme By', *Occasional Papers*, 2005
- Hailong, Ma, *The History of Chinese Muslim Migration into Malaysia* (Qinghai Nasionalities University, 2017)
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2005)
- League, Rugby, 'Boicot Thread Are Paul Torato', *The Canberra Times*, 1981, p. 22
- Luzny, Dusan, and Martin Soukup, 'Encounter of Religions in Papua New Guinea: Toward a Relationship between Christianity and Original Traditions', *Horizons: College Theology Society*, 2023, 1-22
- Schermerhorn, R. A., 'Toward a General Theory of Minority Groups', *Clark Atlanta University*, 25.3 (1964), 238-46
- Topidi, Kyriaki, *State Recognition and Religious Minority Group Agency in a European Context* (The European Centre for Minority Issues, 2022)
- U.S Embassy Tlibisi, 'The Iranian Regime's 40 Year Campaign of Assassinations', *U.S Embassy*, 2020
- United States Department of State, *International Religious Freedom Report*, 2022
- Warnk, Holger, 'The Coming of Islam and Moluccan-Malay Culture to New Guinea 1500-1920', *Indonesia and the Malay World*, 38.110 (2010), 109-134
- Zacco, Franco, 'The Challenges Facing Islam in Papua New Guinea', *PNG Attitude*, 2014